UNIVERSITAS GADJAH MADA
PENYELESAIAN SENGKETA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) ANTARA ASEAN FOUNDATION DENGAN PEKERJA LOKAL (Studi Kasus Putusan Nomor: 143/PDT.SUS-PHI/ 2016/PN.JKT.PST)
FIKRI IQBAL, I Gusti Agung Made Wardana, S.H., LL.M., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Penyelesaian Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Antara ASEAN Foundation Dengan Pekerja Lokal

(Studi Kasus Putusan Nomor: 143/PDT.SUS-PHI/ 2016/PN.JKT.PST)

INTISARI

Oleh:

Fikri Iqbal[1] dan I Gusti Agung Made Wardana[2]

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kesesuaian Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 143/PDT.SUS-PHI/ 2016/PN.JKT.PST dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan ASEAN Foundation *Staff Regulation* serta menganalisis perlindungan hukum pekerja pada organisasi internasional di Indonesia dalam Perkara Putusan Nomor: 143/PDT.SUS-PHI/ 2016/PN.JKT.PST ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan ASEAN Foundation *Staff Regulation*.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, penelitian didukung dengan melakukan wawancara kepada Narasumber untuk mendapatkan penjelasan mengenai data sekunder. Hasil penelitian kepustakaan dilakukan dengan studi dokumen dan hasil penelitian kepustakaan dianalisis secara pendekatan kualitatif. Hasil analisis diuraikan secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa adanya akibat hukum oleh Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 143/PDT.SUS-PHI/ 2016/PN.JKT.PST dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan ASEAN Foundation *Staff Regulation* yang mengakibatkan tidak adanya keadilan baik bagi pekerja pada ASEAN Foundation maupun bagi ASEAN Foundation selaku organisasi internasional di Indonesia itu sendiri dan kurang masksimalnya perlindungan hukum bagi pekerja pada organisasi internasional di Indonesia dalam Perkara Putusan Nomor: 143/PDT.SUS-PHI/ 2016/PN.JKT.PST ditinjau dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan ASEAN Foundation *Staff Regulation*.

Kata Kunci :Pemutusan Hubungan Kerja, Pekerja pada ASEAN Foundation, Penyelesaian sengketa

---

[1] Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
[2] Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
PENYELESAIAN SENGKETA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) ANTARA ASEAN FOUNDATION DENGAN PEKERJA LOKAL
(Studi Kasus Putusan Nomor: 143/PDT.SUS-PHI/ 2016/PN.JKT.PST)
FIKRI IQBAL, I Gusti Agung Made Wardana, S.H., LL.M., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Dispute Settlement Of Termination Of Employment Between ASEAN Foundation With Local Workers

(Case Study on Decision Number: 143 / PDT.SUS-PHI / 2016 / PN.JKT.PST)

ABSTRACT

By:

Fikri Iqbal[1] and I Gusti Agung Made Wardana[2]

This research aims to determine and analyze the Suitability of the Industrial Relations Court Decision in the Central Jakarta District Court Number: 143 / PDT.SUS-PHI / 2016 / PN.JKT.PST with Law Number 13 of 2003 and the ASEAN Foundation Staff Regulation and analyze workers' legal protection for international organizations in Indonesia in Decision Case Number: 143 / PDT.SUS-PHI / 2016 / PN.JKT.PST in terms of Law Number 13 Year 2003 and ASEAN Foundation Staff Regulation.

This research is a normative juridical research, research is supported by conducting interviews with resource persons to get an explanation of secondary data. The results of library research are carried out with document studies and the results of library research are analyzed in a qualitative approach. The results of the analysis are described descriptively.

Based on the results of the study, the author conclude that there are legal consequences by the Panel of Judges on the Decision of the Industrial Relations Court at the Central Jakarta District Court Number: 143 / PDT.SUS-PHI / 2016 / PN.JKT.PST with Law No. 13 of 2003 and ASEAN Foundation Staff Regulation which results in the absence of justice both for workers in international organizations in Indonesia and for the ASEAN Foundation as an international organization in Indonesia itself and the lack of maximum legal protection for workers in international organizations in Indonesia in Case Decision Number: 143 / PDT.SUS- PHI / 2016 / PN.JKT.PST in terms of Law Number 13 Year 2003 and ASEAN Foundation Staff Regulation.

Keywords: Termination of Employment, Workers at the ASEAN Foundation, Dispute Settlement

[1] Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
[2] Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.